

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Hasil analisis menunjukkan bahwa kawasan peri-urban Kota Surakarta memiliki keterkaitan yang erat dengan kota inti dan menerima pengaruh yang kuat dari proses perkembangan perkotaan yang berlangsung di Kota Surakarta. Perkembangan tersebut ditunjukkan oleh meningkatnya aktivitas perkotaan, pertumbuhan kawasan terbangun, serta kebutuhan permukiman yang mulai meluas ke wilayah sekitar Kota Surakarta. Wilayah peri-urban dalam penelitian ini berperan sebagai kawasan transisi yang masih memiliki keterkaitan aktivitas dengan Kota Surakarta, terutama melalui mobilitas penduduk, jaringan jalan, sarana pelayanan, dan perkembangan kawasan permukiman.

Hasil deliniasi kawasan peri-urban menunjukkan bahwa pengaruh Kota Surakarta terhadap wilayah sekitarnya dapat dilihat melalui konsentrasi aktivitas perkotaan dan jarak terhadap pusat kegiatan kota. Analisis kepadatan bangunan, sarana pelayanan, sarana perdagangan dan jasa, serta kerapatan jaringan jalan menunjukkan bahwa pusat aktivitas masih terkonsentrasi pada kawasan inti Kota Surakarta dan menyebar mengikuti koridor jaringan jalan utama. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perkembangan permukiman di wilayah peri-urban dipengaruhi oleh kedekatan terhadap pusat pelayanan dan aksesibilitas.

Hasil analisis kemampuan lahan menunjukkan bahwa wilayah peri-urban Kota Surakarta memiliki potensi yang cukup baik untuk pengembangan permukiman. Kondisi tersebut didukung oleh dominasi wilayah dengan elevasi rendah, lereng datar hingga landai, dan bentuk lahan berupa dataran. Aspek Lahan Sawah Dilindungi (LSD), rencana pola ruang, penggunaan lahan saat ini, kemiringan lereng, serta keberadaan kawasan lindung dan kawasan pertanian pangan menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam arahan pengembangan permukiman.

Hasil analisis kesesuaian lahan menunjukkan bahwa tidak seluruh wilayah peri-urban dapat diarahkan sebagai kawasan pengembangan permukiman. Lahan yang dapat dijadikan potensi pengembangan permukiman adalah lahan yang memenuhi kriteria kemampuan lahan, berada di luar kawasan pembatas, tidak termasuk LSD, memiliki kemiringan lereng yang sesuai, serta selaras dengan rencana pola ruang. Selain itu, pertimbangan nilai tanah menunjukkan bahwa alternatif pengembangan permukiman lebih sesuai diarahkan pada wilayah dengan nilai tanah rendah hingga sedang agar lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan setara UMK Kota Surakarta.

Rencana permukiman di wilayah peri-urban Kota Surakarta perlu diarahkan secara selektif pada lahan yang sesuai secara fisik, sesuai secara tata ruang, tidak mengganggu kawasan pertanian yang dilindungi, serta memiliki nilai tanah yang masih memungkinkan untuk dijangkau masyarakat. Pendekatan ini diharapkan dapat mendukung pengendalian perkembangan Kota Surakarta agar pertumbuhan permukiman berlangsung lebih terarah, efisien, dan berkelanjutan.

5.2 Rekomendasi

Pengembangan permukiman di wilayah peri-urban Kota Surakarta sebaiknya diarahkan pada lahan potensial yang telah memenuhi kriteria kesesuaian lahan. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa kawasan yang dikembangkan tidak berada pada Lahan Sawah Dilindungi, sempadan sungai, kawasan pertanian pangan, maupun kawasan lain yang memiliki fungsi pembatas. Hal ini penting agar pembangunan permukiman tidak menimbulkan konflik pemanfaatan ruang dan tidak mengurangi fungsi ekologis wilayah.

Pemerintah daerah perlu memperkuat pengendalian alih fungsi lahan, terutama pada wilayah peri-urban yang masih memiliki lahan pertanian produktif. Pengembangan permukiman harus tetap mengacu pada rencana pola ruang yang berlaku, sehingga kawasan permukiman baru tidak berkembang secara sporadis dan tidak menimbulkan urban sprawl.

Pengembangan permukiman sebaiknya diprioritaskan pada wilayah yang memiliki aksesibilitas memadai, dekat dengan sarana pelayanan, serta memiliki nilai tanah rendah hingga sedang. Pengembangan permukiman tidak hanya layak secara fisik dan tata ruang, tetapi juga lebih terjangkau bagi masyarakat dengan kemampuan ekonomi setara UMK Kota Surakarta.

Dalam pelaksanaan pembangunan permukiman, perlu diperhatikan penyediaan infrastruktur dasar seperti jaringan jalan lingkungan, drainase, air bersih, sanitasi, dan fasilitas pelayanan. Hal ini diperlukan agar kawasan permukiman baru tidak hanya menjadi perluasan kawasan terbangun, tetapi juga mampu mendukung kualitas hidup masyarakat secara layak.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar analisis dilengkapi dengan data harga rumah, data kemampuan pembiayaan masyarakat, proyeksi kebutuhan hunian, serta validasi lapangan yang lebih rinci. Penelitian lanjutan juga dapat menambahkan analisis kepemilikan lahan dan status tanah agar arahan pengembangan permukiman dapat lebih operasional dan siap digunakan sebagai bahan pertimbangan perencanaan.